



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai perlu Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan segala kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
6. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengolahan arsip dinamis.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
9. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan saran bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

10. Pengamanan arsip dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
11. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
12. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menjadikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah;
 - b. menjadikan petunjuk kepada perangkat daerah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. terklasifikasinya keamanan dan akses arsip dinamis;
 - b. terlindunginya fisik arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan rehabilitas arsip dapat terjaga; dan
 - c. melindungi informasi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

BAB III

KATEGORI KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

Pasal 3

- (1) Kategori klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis terdiri atas:
 - a. biasa/terbuka;
 - b. terbatas; dan
 - c. rahasia
- (2) Arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah arsip yang tidak dikategorikan sebagai arsip terbatas dan arsip rahasia.

- (3) Arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, meliputi:
 - a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
 - b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang;
 - c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
 - d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan
 - e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

- (4) Arsip dinamis yang termasuk dalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi:
 - a. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus/sengketa hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan proposal file;
 - b. arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertifikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik/telepon;
 - c. arsip yang tercipta terkait dengan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. arsip yang terkait dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional;
 - e. arsip yang terkait dengan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - f. arsip dengan isi akta otentik yang terakhir maupun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum;
 - g. arsip yang terkait dengan rahasia atau data pribadi;
 - h. arsip yang terkait dengan memorandum of understanding; dan
 - i. daftar arsip rahasia.

- (5) Penyusunan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis berdasarkan tugas dan fungsi fasilitatif dan substantif.

- (6) Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

BAB IV

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah melakukan pengamanan arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses.

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sarana; dan
 - b. Sumber daya manusia

Pasal 5

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, brankas/lemari besi untuk rahaisa;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - d. pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas keamanan seperti kamera pengawas, kunci pengaman ruang dan media simpan arsip.
- (3) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan sarana perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. Sistem pengelolaan arsip aktif dan inaktif

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip.
- (2) Arsiparis/pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang dan tanggung jawab serta hak akses sesuai pada unit kerja pengelolaan arsipnya.
- (3) Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI
 KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
UMUM						
1	001	Lambang, meliputi : a. Garuda b. Bendera kebangsaan c. Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) d. Bandir/umbul-umbul	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah.	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat Daerah, Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah.
2	002	Tanda kehormatan/penghargaan diberikan kepada non PNS	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Subbagian Administrasi dan Rumah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Tangga Pimpinan Daerah.
3	003	Hari Raya/besar, meliputi : a. Nasional (17 Agustus, hari pahlawan, dsb) b. Keagamaan c. Hari ulang tahun	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah.
4	004	Ucapan, meliputi: a. Terima kasih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan	Tidak memiliki dampak yang	1. Sekretariat/Bagian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Selamat c. Mohon diri d. Bela sungkawa, dan lainnya		internal yang mempunyai hak akses	mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah.
5	005	Undangan (laporan kegiatan pembuatan undangan beserta distribusinya)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah.
6	006	Tanda jabatan (Pamong praja dan pejabat lainnya)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah.
7	007	<p>Urusan dalam, meliputi:</p> <p>a. Gedung kantor termasuk instalasi (listrik, telepon, otomasi/internet, air minum, hidrant, alarm, drainage</p> <p>b. Rumah dinas, persinggahan (mess/wisma/hotel), rumah susun.</p> <p>c. Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, lcd, laptop dll)</p> <p>d. Pengurusan kendaraan dinas</p> <p>e. Keamanan/ketertiban kantor</p> <p>f. Perjanjian kerjasama MOU Pemda dengan sintansi pemerintah, swasta</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;</p> <p>2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi</p>

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> g. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Kenergaraan dan hari-hari besar Keagamaan h. Kebersihan kantor i. Protokol (upacara bendera, tata tempat, pemasangan kepala negara/daerah, audensi, penerimaan tamu) j. Kerjasama 				Pimpinan Sekretariat Daerah, Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah.
8	020	Barang dan Jasa, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Penawaran (barang, jasa) b. Penawaran barang (bergerak, tidak bergerak) c. Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, prakualifikasi, evaluasi, penunjukan lelang d. SPK, kontrak/amandemen/adendum, teguran e. Surat Perintah Mulai Kerja f. Serah terima pekerjaan g. Pemeriksaan pekerjaan h. Perpanjangan waktu i. Denda j. Sanggahan k. Pemeliharaan barang/jasa 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Sekretariat Daerah, Sub Bagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inventaris termasuk pendataan, pemeliharaan, penghapusan barang milik negara				3. Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan Daerah. 4. Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah
9	020	m. ULP Barang dan Jasa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Sub Koordinator Pengelolaan Layanan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
10	020	n. Usulan tentang pengadaan barang pakai habis beserta distribusi dan pelaporannya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian umum, Subbagian Perlengkapan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Subbagian Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Daerah pada Sekretariat Daerah; 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah
11	030	Kekayaan Daerah, meliputi : a. Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak) b. Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen, bangunan bersejarah, dll) c. Barang persediaan dalam gudang d. Alat pengangkut (laut, darat, udara) e. Peralatan pabrik, Laboratorium f. Peralatan kesehatan/medis (rumah sakit, balai pengobatan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian umum, Subbagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah; 3. Bidang Aset, Sub Bidang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> g. Usulan penambahan aset daerah, barang bergerak maupun tidak bergerak h. Permintaan perbaikan, perawatan barang inventaris beserta pelaporannya i. Penghapusan aset-aset barang milik Daerah j. Usulan kebutuhan barang/jasa pendukung operasional kegiatan rumah tangga Dinas, Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda beserta pelaporannya 				Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada DPPKAD.
12	030	<ul style="list-style-type: none"> k. Peminjaman sarana/prasarana, gedung kantor/barang inventaris, aset bergerak maupun tidak bergerak l. Tata cara, prosedur pengamanan dan ketertiban aset-aset barang milik daerah 	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan interna; yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian umum, Subbagian Perlengkapan Pada Sekretariat Daerah; 3. Bidang Bidang Aset, Sub Bidang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Pada DPPKAD.
13	040	Kebijakan pemerintah pada bidang Kearsipan dan Perpustakaan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan dan pengawas serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Subbagian Program dan Keuangan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14	040	Akuisisi, pengolahan dan penyimpanan bahan perpustakaan Pelestarian bahan perpustakaan Pengolahan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekan Penyusunan Bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder Transliterasi, translasi Survey kondisi bahan perpustakaan Perawatan, pemeliharaan, pengawetan bahan perpustakaan dan alih media bahan perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan, Sub Koordinator Pelestarian Kepustakaan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
15	040	Pengembangan bahan perpustakaan Pembinaan perpustakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Perpustakaan, Sub Koordinator

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Pengembangan dan kerjasama perpustakaan Pembudayaan gemar membaca Penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perpustakaan Bimbingan Teknis perpustakaan dan kepestakawanan, Penilaian Angka Kredit Pustakawan Pemasyarakatan bidang perpustakaan</p>		mempunyai hak akses.	kinerja Perangkat Daerah	Pengembangan Perpustakaan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16	040	<p>Pembinaan Dan pengembangan Kearsipan Bimbingan Teknis Kearsipan Pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Orpal dan masyarakat Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria arsip Pengembangan kelembagaan, Sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem kearsipan Penyusunan kajian bidang kearsipan, pengembangan laboratorium sistem kearsipan Audit kearsipan, evaluasi dan Penilaian hasil pengawasan kearsipan</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan, Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
17	040	<p>Akuisisi arsip</p> <p>Penilaian dan verifikasi arsip yang akan disusutkan</p> <p>Koordinasi dan konsultasi akuisisi arsip</p> <p>Penerimaan, Pemindahan dan penyerahan arsip</p> <p>Penelusuran dan wawancara secara lisan</p> <p>Penyelamatan arsip vital daerah</p> <p>Pengolahan fisik arsip dan informasi arsip</p> <p>Penyusunan indeks, guide, daftar dan inventaris arsip</p> <p>Transkripsi rekaman suara</p> <p>Penyusunan arsip citra daerah</p> <p>Pelestarian dalam bentuk penyelamatan, pemeliharaan dan perlindungan arsip</p> <p>Alih Media dan Reproduksi arsip statis</p> <p>Pengujian kualitas media arsip dan sarana kearsipan</p> <p>Restorasi dan registrasi arsip</p> <p>Autentikasi arsip statis</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan, Sub Koordinator Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18	040	<p>Penelusuran sumber dan wisata arsip</p> <p>Penyajian informasi arsip dan penerbitan naskah sumber arsip</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Kearsipan, Sub Koordinator Pengelolaan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan tayangan naskah sumber arsip Pengolahan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Penghimpunan dan penyajian data dan informasi kearsipan Pameran, publikasi dan pemasyarakatan kearsipan		mempunyai hak akses.	Perangkat Daerah	Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19	040	Laporan kegiatan operasional Perawatan Arsip beserta pengamannya aset-aset arsip	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan, Sub Koordinator Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
20	040	SANDI 1. Pengamanan Persandian dan Informasi 2. Tata kelola persandian 3. Pembinaan, peningkatan kesadaran pengamanan informasi 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persandian 5. Pengelolaan security operation center	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Statistik dan Persandian pada Diskominfo

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
21	050	RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Renstra (Rencana Strategi) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra Bappeda Program Nasional RKP (Rencana Kerja Pemb.) RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian lembaga) RKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja Pemb. Daerah) Rencana Kerja Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada BAPPEDA 2. Sekretariat. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA
22	050	KUA (Kebijakan Umum Anggaran) KUPA (Kebijakan Umum Perub. Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Gub. Atas Pandangan Fraksi Nota Keuangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada BAPPEDA; 2. Sekretariat, Subbagian Keuangan;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Laporan berkala Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				
23	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tat tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai Organisasi Non Pemerintah Organisasi Internasional Organisasi semi Struktural Kelas Jabatan Analisis Jabatan Pengukuran/ Penilaian beban kerja Jabatan – Struktural dan Fungsional Uraian Jabatan Standar Kompetensi Teknis Standar Kompetensi Manajerial	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/ Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi , Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pada Sekretariat Daerah
24	060	Ketatalaksanaan Tata Naskah Dinas Stempel dinas dan stempel jabatan, Nama instansi pemerintah/ non pemerintah, Alamat-alamat kantor dan pejabat, Ketentuan pakaian dinas dan atribut Pola Hubungan Kerja, Standar Operasional Prosedur Hari dan Jam Kerja Pegawai Indeks Kepuasan Masyarakat Standard Pelayanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/ Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi ,Sub

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Inovasi Pelayanan Standard Prasarana Kerja Pegawai				Koordinator Tata Laksana dan Pelayanan Publik Pada Sekretariat Daerah
25	050	Akuntabilitas Kinerja Zona Integritas Reformasi Bagian kasi Budaya Kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi,Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Daerah
26	070	Penelitian dan Pengembangan Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai laporan riset	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada BAPPEDA 2. Sekretariat/Ba gian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
27	070	Pengembangan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SINAS (Sistem Informasi Nasional)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitiandan Pengembangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
28	070	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster Kab/Kota Desa Inkubator Teknologi dan Bisnis	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
29	070	Pameran Produk Inovasi/Ristek BTC (Bisnis Teknologi Center) Raptek (Penerapan Iptek) KHI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Kajian Strategi/diskusi/FGD Seminar, Workshop	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
30	070	Kerjasama Penelitian Rapat Koordinasi?Rapat Teknis Lokakarya Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian Kerjasama Penelitian Instansi Pemerintah Pusat/Daerah Perguruan Tinggi/Swasta Lembaga Swasta Nasional, LSM Lembaga Internasional Perekayasaan Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan) Publikasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;

NO	KODE KLASIFIKASI I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Jurnal Ilmiah				
31	080	Konferensi pers/rapat koordinasi termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Perangkat daerah, instansi lainnya (dalam dan luar negeri) Himpunan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda Studi banding, Kunjungan kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah; 2. Bagian Umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah,Subbagian Protokol Pada Sekretariat Daerah
32	080	Bahan materi sambutan pidato Bupati, Wakil Bupati, Sekda	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah, 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah,

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Subbagian Protokol Pada Sekretariat Daerah.
33		Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Kebijakan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Pelayanan dan pembangunan dengan lembaga masyarakat, promosi dan informasi serta anjungan TMII	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian TU pada Badan Penghubung
34	090	Perjalanan dinas (SPT/ST/SPPD) meliputi : a. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, Wakil Kementerian, Tamu asing (ke daerah, Eselon I), Gubernur, Wakil Gubernur b. Bupati, Wakil Bupati c. Laporan perjalanan pegawai, SPPD ke Pusat, Daerah dan Luar Daerah d. Laporan hasil kegiatan peliputan Kunker RI, Wagub, Menteri, pejabat pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur ke daerah e. Laporan hasil peliputan kegiatan Kunker Bupati, Wakil Bupati, Sekda ke Kecamatan dan desa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah; 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Pada Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
35	090	f. Laporan Perencanaan kegiatan Kunker Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pejabat Pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati ke daerah	Rahasia	Dibatasi hanya untuk pihak Panitia penyambutan protokoler, penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	Sangat memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah bila ternyata berpotensi mengganggu keamanan kunjungan	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah; 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah, Subbagian Protokol Pada Sekretariat Daerah
36		g. Laporan perencanaan kegiatan kunker Bupati, Wakil Bupati, Sekda ke kecamatan dan desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk pihak Panitia penyambutan protokoler, penentu kebijakan, pengawas, penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada Perangkat Daerah; 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah, Subbagian Protokol Pada

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Sekretariat Daerah
II. KEPEGAWAIAN						
37	800	KEBIJAKAN Kepegawaian, meliputi : a. Perencanaan b. Penelitian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD
		c. Statistik	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada BKD
38	810	Pengadaan Pegawai, meliputi : a. Pendaftaran CPNS (Testing, Screening, Pengumuman tes dan pemanggilan, Pengujian kesehatan, Pengangkatan cpns golongan I-III) b. Pendaftaran tenaga kontrak kerja/MITRA KERJA	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bagian Umum, Bagian TU pada Perangkat Daerah 2. Sub Koordinator Pengadaan dan Pemberhentian Pada BKD
39	820	Mutasi, meliputi : a. Pengangkatan CPNS b. Pengangkatan PNS golongan I-III	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Sub Koordinator Pengadaan dan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				mempunyai hak akses	kinerja Perangkat Daerah	Pemberhentian Pada BKD
40	820	c. Pengangkatan dan pembebasan dalam jabatan struktural Eselon I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD
41	820	d. Pengangkatan dan pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional
42	820	e. Kenaikan gaji berkala golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pada BKD
43	820	f. Kenaikan pangkat golongan I-IV g. Pemindehan/pelimpahan/pembantuan golongan I-IV h. Lolos butuh i. Datasing dan penempatan kembali j. Wajib militer	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pada BKD

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
44	830	Kedudukan, meliputi : a. Peninjauan masa kerja	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Mutasi dan Kenaikan Pangkat
		b. Penyesuaian pangkat/gaji golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pada BKD
		c. Penghargaan ijasah (pencantuman gelar)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordin Pada BKD ator Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pada BKD
45	840	Kesejahteraan Pegawai, meliputi : a. Tunjangan (struktural/fungsional) b. Kehormatan c. Tambahan penghasilan d. Taspen, Askes, BPJS, bantuan pendidikan, perumahan e. Surat dispensasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Informasi Kepegawaian Pada BKD
46	850	Cuti, meliputi : a. Tahunan b. Besar c. Sakit	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sub Koordinator Informasi Kepegawaian Pada BKD

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		d. Bersalin e. Alasan penting f. Di luar tanggungan negara		mempunyai hak akses	Perangkat Daerah	
47	860	Penilaian, meliputi : a. Penghargaan (satyalencana karya satya, kanaikan pangkat anumerta, hadiah kenaikan pangkat, pegawai teladan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sub Koordinator Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pada BKD
48	860	b. Hukuman (ringan, sedang, berat)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;
49	860	c. Konduite/ DP3	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Sub Koordinator

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Informasi Kepegawaian Pada BKD 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;
50	860	d. Ujian dinas tingkat I I, III dan IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Pada BKD
51	860	e. Penilaian kinerja (struktural dan fungsional)	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas kebijakan dan penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah, terkait data pribadi	1. Sub Koordinator Mutasi dan Kenaikan Pangkat Pada BKD; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
52	860	f. Rehabilitasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD
53	870	Tata Usaha Kepegawaian, meliputi: a. Fotmasi pegawai	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
54	870	b. Bezetting/daftar urut kepegawaian c. DUK Non PNS tidak tetap/BLUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
55	870	d. Sistem informasi kepegawaian (NIP, KARPEG, tanda pengenal, KARSU/KARIS, daftar riwayat pekerjaan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
56	870	e. Kewenangan administrasi kewenangan (pelimpahan wewenang, spesimen tanda tangan)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD
57	870	f. KORPRI	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier ASN Pada BKD;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					Perangkat Daerah	2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
58	880	Pemberhentian, meliputi : a. Permintaan sendiri termasuk pengunduran diri dengan hak pensiun golongan I-IV	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah;
59	880	b. Pensiun (janda/duda, yatim piatu)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
60	880	c. Karena meninggal	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD; 2. Sekretariat, Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
61	880	d. Alasan lain, keuzuran jasmani	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD.
62	880	e. Tidak dengan hormat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				kebijakan dan penegak hukum	Perangkat Daerah, terkait data pribadi	Kepegawaian Pada BKD.
63	880	f. Pembekalan pns yang akan purna dan tali asih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKD
64	880	g. Pemberhentian pegawai Non PNS tidak tetap/BLUD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
65	890	Pendidikan Pegawai (Tata Usaha) : a. Perencanaan program pelatihan b. Sarana Pendidikan c. Jenis diklat dan Pelaporan diklat d. Pengembangan kompetensi pegawai e. Tugas belajar (ijin belajar, tunjangan, bantuan pendidikan, penempatan kembali) f. Tenaga pengajar/narasumber g. Jurnal Ilmiah h. Penelitian i. Magang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Pada BKD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		j. Short course/in house training k. Evaluasi pasca diklat dan evaluasi narasumber				
66	890	Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu : a. Sertifikasi Kompetensi b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan tenaga Pengajar c. Pengendalian Mutu Diklat d. Kerjasama Penyelenggaraan Diklat e. Karya Tulis/Lokakarya f. Kurikulum, Silabi dan Modul g. Metode Pembelajaran (kuliah, Ceramah, Simposium, diskusi kuliah lapangan, kurikulum, karya tulis)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Pada BKD
67	890	Pengembangan Kompetensi Teknis : a. Pengembangan Kompetensi/Diklat Teknis Umum b. Pengembangan Kompetensi/Teknis Inti c. Pengembangan Kompetensi/Teknis Pilihan d. Praktek Lapangan/Observasi Lapangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Pada BKD
68	890	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional: a. Pengembangan Kompetensi/Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Pengembangan Kompetensi dan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		b. Pengembangan Kompetensi/Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional c. Pengembangan Kompetensi/Diklat Teknis Jabatan Fungsional d. Praktek Lapangan/Observasi Lapangan		mempunyai hak akses	Perangkat Daerah	Kinerja ASN Pada BKD
69	890	Pengembangan Kompetensi Managerial : a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Daerah c. Pendidikan Dasar bagi CPNS d. Visitasi/Benchmarking e. Inovasi Kepemimpinan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja ASN Pada BKD
III. KEUANGAN						
70	900	Keuangan meliputi a. Nota Keuangan b. APBN c. APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Anggaran pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
71	910	Anggaran, meliputi : a. Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	1. Bidang Anggaran, Sub bidang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>OPD/PPKD, pemimpin dan pejabat keuangan, pejabat teknis BLUD</p> <p>b. DPA/DPPA/DPAL-OPD/PPKD</p> <p>c. Anggaran kas</p> <p>d. Surat Penyediaan dana (SPD)</p>		pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	<p>Perencanaan Anggaran pada DPPKAD;</p> <p>2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.</p>
72	920	Akuntansi yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi pada DPPKAD
73	930	Perbendaharaan meliputi surat perintah pencairan dana (SP2D), surat penolakan penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD
74	940	Pembinaan kebendaharaan yaitu bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	1. Bidang Perbendaharaan Sub Bidang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				mempunyai hak akses	kinerja Perangkat Daerah	Perbendaharaan Keuangan Daerah pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
75	950	Pengelolaan kas daerah meliputi a. Laporan pemotongan IWP, taperum, pph 21 dari gaji b. Laporan rekapitulasi penerimaan daerah c. Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (ppn/pph) dari CV/PT/instansi d. Surat tanda setoran (STS) e. Laporan realisasi daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran f. Rekonsiliasi meliputi surat penerimaan, laporan bank	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
76	950	g. Laporan mutasi penempatan deposito h. Surat perintah transfer uang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
77	960	Evaluasi dan Pengendalian meliputi Tuntutan (ganti rugi dan perbendaharaan), Evaluasi dan perubahan APBD Kab/Kota serta pertanggung jawaban APBD Kab/Kota, Edaran keuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Perbendaharaan, Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
78	960	Penjualan kendaraan dinas melalui lelang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
79	961	Laporan Hasil Pemeriksaan (Inspektorat dan BPK)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Akuntansi, Sub Bidang Akuntansi Penerimaan, Pengeluaran dan Informasi Keuangan Daerah pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
80	970	PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21) Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam/Migas Subsidi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Reklame	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset, Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
81	970	Retribusi bidang kesehatan, bidang seni budaya dan pariwisata, bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar) Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan) Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk tryaek, kelebihan muatan, telekomunikasi, parkir dll) Retribusi penggunaan air bawah tanah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset, Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada DPPKAD;; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing-masing

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Perangkat Daerah.
82	970	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll) Retribusi bidang perikanan dan kelautan Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi Cukai Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset , Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
83	970	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Pajak Retribusi Bunga Deposito Bungan Tabungan Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset, Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada DPPKAD;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sumbangan Pihak Ke Tiga (Kendaraan (Dealer), Kayu) Penerimaan lain-lain Penerimaan kembali kredit BKK Ternak tidak layak bibit Sewa Internet Penerimaan Dari Dana Bergulir/Revolving Kerjasama Deangan BUMIDA Penerimaan DUKS				2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
84	970	Pengolahan data pendapatan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) Pengembangan sistem informasi pendapatan Pengembangan potensi dan pengembangan pendapatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Aset , Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada DPPKAD; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	2	4	5	6	7
I. PEMERINTAHAN						
1	120	PEMERINTAH KABUPATEN Monografi, Tambahan kode wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah
2	120	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati (Lkpj) Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi Vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kerjasama Antar Daerah, Luar Provinsi dan Luar Negeri Bupati, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dan sebagainya Wakil Bupati, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida				Pada Sekretariat Daerah
3	120	Penyerahan Urusan/SPM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penanaman Modal, Sub Koordinator Pengembangan dan Promosi pada DPMPTSP
4	120	Pemindahan Ibukota Kabupaten Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan Penyerahan Urusan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	120	Pembentukan/Pemekaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah
6	120	Pembentukan Daerah Otonom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah
7	120	Pembentukan Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah.
8	120	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Pada Sekretariat Daerah
9	120	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah.
10	120	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah.
11	120	Pembagian Wilayah Pemerintahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah.
12	130	Wilayah Kecamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bagian Pemerintahan, Sub Koordinator

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				mempunyai hak akses	kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Kewilayahan Pada Sekretariat Daerah.
13	140	PEMERINTAH DESA APBDes/Kel Permasalahan Batas Desa/Kelurahan penghapusan Desa/Kelurahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah 2. Bagian TU dan Bidang Pengembangan dan Penataan Desa Pada Dispermades
14	160	DPRD a. Pencalonan, pengangkatan, pengambilan sumpah, pelanggaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Persidangan pada Sekretariat DPRD
15	160	b. Pemberhentian antar waktu, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan c. Alat kelengkapan dewan (pimpinan badan musyawarah, komisi, badan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bagian Umum Sekretariat DPRD

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain/pansus)</p> <p>d. Persidangan (rapat-rapat : paripurna, paripurna istimewa, pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, PANSUS, komisi, gabungan komisi, konsultasi, kerja, dengar pendapat, dengar pendapat umum, pemandangan umum, fraksi)</p> <p>e. Fraksi (tata tertib, kode etik)</p> <p>f. Reses, peninjauan/kunjungan lapangan, kunjungan kerja/study banding/konsultasi</p> <p>g. Kesejahteraan, keuangan dan penghargaan</p> <p>h. hak</p>		serta penegak hukum	Perangkat Daerah	
16	180	<p>Perundangan tingkat provinsi meliputi perda, peraturan gubernur/instruksi gubernur</p> <p>Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Peraturan daerah, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota</p> <p>Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perundangan Tingkat Desa meliputi Keputusan Kepala Desa	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah
17	180	Perundangan tingkat provinsi meliputi Kepgub Perundangan Tingkat Kab/Kota meliputi KepBup/KepWal Keppres, Kepmen Peradilan Umum, Peradilan Negeri Tingkat Pertama Peradilan Tinggi, Mahkamah Agung	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah
18	180	Peradilan Tata Usaha Negara	Rahasia	Pengguna dari internal yang mempunyai hak akses	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Hukum, Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah
19	200	POLITIK Pembina dan Pemahaman Ideologi Negara Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam Orde Baru Ore Reformasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
20	210	Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, data kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai/Organisasi Terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang Ijin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan , Sub Koordinator Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol
21	220	Organisasi Kemasyarakatan Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi		serta penegak hukum	Perangkat Daerah	pada Badan Kesbangpol
22	220	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol
23	220	Verifikasi dan rekomendasi hibah Ormas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol
24	230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan kabupaten/Kota pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Daftar inventaris kekayaan organisasi				
25	240	ORGANISASI PEMUDA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol pada Badan Kesbangpol
26	250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol pada Badan Kesbangpol Kabupaten Rembang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
27	260	ORGANISASI WANITA Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Musna/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol
28	260	Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan , Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan
29	270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKASA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH) Pencalonan Nomor Urut/Tanda Gambar Kampanye Dana Kampanye Petugas Pemilu Pemilih/Daftar Pemilih Sarana (TPS, Kendaraan, Surat Suara, Kotak Suara)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol; 2. Bagian Tata Pemerintahan pada Badan Kesbangpol.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemungutan Suara/Penghitungan Suara				
30	270	Verifikasi dan rekomendasi hibah KPU	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang ketahanan Bangsa pada Badan Kesbangpol
31	280	PENGAWASAN PEMILU/PILKADA Pemantauan Pelanggaran Sengketa Panwaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat dan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol; 2. Bagian Tata Pemerintahan pada SETDA.
32	280	Verifikasi dan rekomendasi hibah Bawaslu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Politik Dalam Negeri pada badan Kesbangpol
33	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
34	300	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ ancaman keamanan/ketertiban umum Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas pada Satpol PP
35	300	Pengawasan Trantibum Penegakan Pelaksanaan Perda Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda Patroli Wilayah Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing Pengamanan Pengawalan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas pada Satpol PP
36	310	PER TAHANAN Darat, Laut, Udara Ketahanan Bangsa Ketahanan Ekonomi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Kewenangan Pusat

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Masyarakat		serta penegak hukum	Perangkat Daerah	
37	330	KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Huru-hara/Demonstrasi Senajata Api/Tajam Bahan Peledak Perjudian Surat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Seksi Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas
38	330	Bahan Laporan : - Data Eks Narapidana Teroris - Data Jaringan Intelijen - Data Penanganan Konflik/Penyelesaian Konflik Sosial yang masih berjalan - Laporan Rakor Pengamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Kesbangpol
39	330	Hasil Pelaksanaan Monitoring Penanganan ideologi/faham lain - Daftar Data Pengurus Anggota Organisasi Terlarang - Daftar Berkala tentang keadaan anggota Organisasi Terlarang Laporan Umum (Kondisi, Jumlah Kekuatan) mengenai Organisasi terlarang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Kesbangpol

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
40	330	Bendel Rahasia Intelijen meliputi : Dokumen Faham Lain - Dokumen Gafatar - Dokumen Persebaran HTI - Data Organisasi Terlarang/PKI - Data Napi teroris - Data Radikal Kanan - Data Jaringan Intelijen	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Kesbangpol
41	340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) Kebijakan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas Pembinaan dan Diklat Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas Pendidikan/latihan Linmas Pelatihan PAM Swakarsa Pelatihan/latihan MENWA Pengerahan dan pengendalian Linmas Kesejahteraan bagi anggota Linmas Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas Santunan uang duka bagi anggota Linmas Penghargaan bagi anggota Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
42	340	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa Linmas Lanjut Usia Orientasi Kesadaran Bela Negara Kegiatan Pelaksanaan Linmas	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP
43	350	KEJAHATAN Makar/Pemberontakan/Terrorisme Pembunuhan Penganiayaan/Pencurian/Perampasan Subversi/Penyelundupan/Narkotika Penipuan dan Pemalsuan Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
		Kekerasan pada perempuan dan anak Pelaporan Penanganan korban Kenakalan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sub Koordinator Perlindungan Anak pada Dinas Sosial
		Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Perempuan pada Dinas Sosial
44	360	BENCANA Pelatihan, Posko Bencana Surat Keputusan, Berita Acara, MOU, Koordinasi Gunung Merapi/Gempa/Tsunami Banjir/Tanah Longsor/Angin Topan Kebakaran/Kekeringan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sub Koordinator Pencegahan pada BPBD
45	370	KECELAKAAN Latihan SAR Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan manajemen bagi pejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP Latihan ketrampilan pemadam kebakaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sub Koordinator Pencegahan pada BPBD
46	370	Kecelakaan Darat, Laut, Udara Investigasi/penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pemadam Kabakaran pada BPBD
47	380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Perencanaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	Sekretariat, Bidang Kedaruratan,

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perencanaan teknis Rekomendasi Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi PUSDALOPS Kunjungan lapangan Relawan Laporan Bencana		pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	Logistik danRehabilitasi Sub Koordinator Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD
48	390	Kerjasama BPBD dengan instansi lain Inventarisasi Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pati dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana Percepatan Perubahan Peraturan Permendagri/Peraturan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada BPBD
49	390	Berita Acara Hibah Peralatan BNPB Berita Acara Pinjam Pakai Peralatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kedaruratan, Logistik danRehabilitasi pada BPBD
50	390	Rekomendasi Bantuan Peralatan Peralatan Rapat Koordinasi PBD	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Kedaruratan, Logistik

NO	KODE KLASIFIKASI I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					Perangkat Daerah	dan Rehabilitasi pada BPBD
51	390	Kegiatan dari instansi luar BPBD terkait Pencegahan dan Kesiapsiagaan Surat Keputusan Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD
52	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Penataan Desa pada Dispermades
53	410	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN Gotong-royong Swadaya gotong-royong Pembinaan Pungutan Lembaga Sosial Desa (LSD) Latihan kerja masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penyuluhan Masyarakat Desa Kelembagaan Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Perekonomian Desa Pembiayaan Pembangunan Desa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dispermades; 2. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Inventarisasi Data				
54	410	Petunjuk/Pembinaan/Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Bantuan/Stimulasi Perkreditan Desa Pelaporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Koperasi Desa Badan Usaha ?Unit Desa (BUUD) Koperasi Unit Desa (KUD) Sarana dan Prasarana Desa Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa Perbaikan Kampung Teknologi Tepat Guna (TTG) Pengembangan Desa Perlombaan Desa dan Kelurahan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri, Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga lainnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian TU, Bidang Pengembangan dan Penataan Desa pada Dispermades.
55	420	PENDIDIKAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. Sekretariat, Bidang pada Disdikbud; 2. Bagian Dikbudpora

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb			Perangkat Daerah	dan Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
56	420	Ijazah, sertifikat	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bagian TU, Bidang Pembinaan SMA/SMK/Dik sus pada Disdikbud; 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
57	420	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pendidikan Khusus pada Disdikbud; 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

NO	KODE KLASIFIKASI I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
58	420	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK Tahun Pelajaran Hari Libur Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains, Pelajar teladan, pertukaran Pelajar)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Sekolah Dasar, Seksi Peserta Didik, Penilaian dan Kurikulum SD, pada DINDIKPORA; 2. Bidang Sekolah Menengah Pertama Seksi Peserta Didik, Penilaian dan Kurikulum SMP; 3. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
59	420	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kurikulum	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Karya Tulis, Karya Ilmiah Ujian				<p>pada DINDIKPORA;</p> <p>2. Bidang Sekolah Dasar, Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD pada DINDIKPORA;</p> <p>3. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.</p>
60	420	Sarana Pendidikan (buku, perlengkapan pendidikan) Bangunan Pendidikan (Laboratorium, Perpustakaan) Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	<p>1. Bidang Sekolah Dasar, Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD pada DINDIKPORA;</p> <p>2. Bidang Sekolah tengah Menengah Pertama, Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP</p>

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						pada DINDIKPORA; 3. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
61	420	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi) Pertukaran guru ke Luar Negeri Sertifikat Guru	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, DIKMAS dan SMP pada DINDIKPORA ; 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
62	420	Sistem Informasi dan TIK pendidikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	1. DINDIKPORA 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					Perangkat Daerah	Kesejahteraan Rakyat.
63	426	KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade) Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll) Olah Raga Rekreasi/Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional) Iptek dan Industri Olah Raga Sarana Prasarana Keolahragaan Kemitraan Olah Raga	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pemuda dan Olahraga, Seksi Olahraga pada DINDIKPORA
64	427	KEPEMUDAAN Pertukaran Pemuda Paskibraka Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja Kemitraan Pemuda Karang Taruna Kepramukaan/Kepanduan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pemuda dan Olahraga, Seksi Olahraga, Seksi Kepemudaan pada DINDIKPORA
65	430	KEBUDAYAAN Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan Kesenian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. DINDIKPORA 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)				
66	430	Sarana Gedung Kesenian Padepokan Lembaga Adat Kegiatan adat/tradisi Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : festival, pentas seni Kepurbakalan Museum Peninggalan Kuno Casndi, termasuk pemugaran Benda Sejarah Bahasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. DINDIKPORA; 2. Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
67	430	Penghayat Kepercayaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak Daerah Kabupaten Rembang yang mengganggu kinerja Perangkat	Sub Bagian Agama dan Pendidikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
68	440	KESEHATAN Kebijakan dan Program Pembangunan kesehatan (Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan kesehatan,	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKASI I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		kesehatan masyarakat, SDK, Sekretaris) SOP Praktek Klinik Laporan Bulanan (PTRM/HIV AIDS/TB DOT)		serta penegak hukum	Perangkat Daerah	
69	440	Jiwa Perawatan Obat-obatan (penyimpanan dan pengawasannya) Pengadaan Obat Terlarang Kelamin, HIV, AIDS, IMS Pelayanan Media (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum) IGD; ICU IBS MCU (Medical Check Up) Farmasi Laboratorium Klinik, Patologi, Anatomi, Forensik	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum		1. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan 2. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan pada RSUD dr. R. Soetrasno
70	440	Bank Darah Rumah Sakit Sanitasi Rumah Sakit CSSD/Laundry Kasus Hukum Rumah Sakit Tenaga Medis Perencanaan Tenaga Medis Perijinan untuk Tenaga Medis Standarisasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang,

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penyimpanan Distribusi IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)				Bidang Umum, Instalasi CSSD pada RSUD dr. R. Soetrasno
71	440	Rekam Medis	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penunjang, Instalasi Rekam Medik pada RSUD dr. R. Soetrasno
72	440	Gigi Mata Kesehatan Ibu dan Anak BPJS JPSBK (jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan) JAMKESMAS JAMKESDA JAMPERSAL Jaminan lainnya Pemeriksaan obat Distribusi obat Obat Generik T.B.C Kusta Frambusia Kholera SARS, dan jenis penyakit lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan; 2. Bidang Pelayanan, Seksi Penunjang Medis pada RSUD dr. R. Soetrasno

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B) Malaria Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD Filaria Serangga				
73	440	Rabies Antrak Leptosirosis Chikungunya Penyakit lainnya Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular A. Pektoris IMA (Irama Mastomik Akut) Hipertensi Stroke Diabetes Melitus Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks, Mammae, Hepar, Paru dan lainnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan
74	440	Epidemiology dan Karantina (Epidka) Imunisasi Surveilanse Pestisida Pencemaran Jamban Keluarga Kesehatan Institusi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Gigiene sanitasi Tempat-tempat Makanan minuman Sarana air minum Pestisida, insektisida Pencemaran				
75	440	Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan penyakit menular langsung				Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Layanan Kesehatan pada RSUD dr. R. Soetrasno
76	440	RSU, RS Khusus PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling Poliklinik dan Balai Kesehatan Rumah Bersalin Posyandu Laboratorium Kesehatan Sanatorium Kesehatan Kanker	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb Pemalsuan obat Pemberantasan dan Pencegahan penyakit Menular langsung				
77	440	Perijinan untuk tenaga medis meliputi surat ijin praktek dan surat ijin kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Subbagian Perencanaan Dinas Kesehatan
78	450	Bantuan di bidang keagamaan Islam Peribadatan (Sholat, Zakat, Haji/Umroh) Infaq, Shodaqoh Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau) Tokoh Agama Pendidikan Agama Pendidikan Tinggi Agama Menengah, MTs, MA Dasar, Pra Sekolah, MI Lembaga pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Bina Mental Spiritual pada SETDA

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll				
79	450	Tenaga Pengajar Dakwah (Pengajian, MTQ) Wakaf Mazhab Agama Islam Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i) Kristen Protestan, Katholik (Peribadatan, Rumah Ibadah Gereja dll) Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll) Mazhab, Organisasi Gerejani) Hindu, Budha dan Kong Hu Cu Peribadatan Rumah Ibadah (Pura, Candi, Vihara, Klenteng) Tokoh Agama, Rohaniawan Mazhab, Organisasi Agama	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Bina Mental Spiritual pada SETDA
80	460	SOSIAL Rehabilitasi Penyandang Cacat Cacat Ganda Cacat Fisik Cacat Mental/Eks Psikotik Rehabilitasi Sosial	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengemis, Gelandangan/Orang Terlantar (PGOT) Anak Jalanan Tuna Susila Anak Nakal Tuna Wisma Lanjut usia				Pada Dinsos PPKB
82	460	Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan.	1. Sekretariat, Bidang Rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada SETDA.
83	460	Keperintisan dan Kepahlawanan Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya. Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan. Veteran Cacat Veteran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial, pada

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Kesejahteraan Sosial				Pada Dinsos PPKB 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada SETDA
84	460	Taman Makam Pahlawan (TMP) Penyelenggaraan Undian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Pemberdayaan Pada Dinsos PPKB
85	460	Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat Sosial: Karang Taruna Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) Organisasi Sosial (Orsos) Dunia Usaha		Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaa Sosial, Sub Koordinator Pemberdayaan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Pada Dinsos PPKB
86	460	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi Truna siaga Bencana (TAGANA) Tenaga Pelopor Perdamaian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial Pada Dinsos PPKB
87	460	Masyarakat miskin : Raskin, BLT dll Masyarakat Miskin Pedesaan Masyarakat Miskin Perkotaan Pengelolaan Data Kemiskinan Sumbangan Sosial	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Dinsos PPKB
88	460	Korban Bencana Jaminan Sosial Pencairan dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb Panti Asuhan Bimbingan Sosial	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, Sub Koordinator

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunikasi Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya PMI Makam Umum Pahlawan Khusus, Keluarga, Raja Krematorium				Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Dinsos PPKB
89	460	Kualitas Hidup Perempuan Perlindungan Perempuan Pengarutamaan Gender (PUG) Kejahatan Lainnya (Trafficking, hipnotis, dll) Kesejahteraan Anak Pengarutamaan Hak-hak Anak (PUHA) Perlindungan Anak Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pada Dinsos PPKB; 2. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan Pada Dinsos PPKB.
90	460	Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pelaporan Penanganan Korban	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Anak Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan Pada Dinsos PPKB
91	470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan Pendaftaran Penduduk Identitas Penduduk Biodata Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
92	470	TRANSMIGRASI Penyediaan informasi daerah transmigrasi Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi Permasyarakatan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada SETDA

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kerjasama di bidang transmigrasi Kepulangan transmigrasi karena daerah terjadi konflik Pemukiman transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum/social dan jaringan transportasi Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi Tata ruang pemukiman transmigrasi				

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rancangan dan pemanfaatan areal tanah				
93	470	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan Pengerahan Pendaftaran dan seleksi calon transmigran Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada SETDA
94	470	Rancangan Kapling TSM Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah Pengukuran batas unit pemukiman Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah Sarana pemukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian penyediaan sarana air bersih	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada SETDA

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan				
95	470	Pemberangkatan transmigran Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan Pengawasan perjalanan transmigran Pengaturan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan Penempatan Transmigran Kesiapan lokasi dan daya tampung Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial pada SETDA

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penampungan transmigrasi (transitol), pelatihan transmigran dan program/metode pengajaran Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyusunan calon peserta/pelatih Penampungan transmigran di transito Pelayanan kesehatan bagi transmigran Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat transmigrasi Identifikasi dan penjajagan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian Iedntifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan Pendidikan, Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan,				

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status, Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat</p> <p>Pembinaan kesehatan</p> <p>Penyediaan sarana kesehatan dan KB</p> <p>Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa</p> <p>Pendistribusian bantuan pangan</p> <p>Pembinaan rohani</p>				
96	470	<p>Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama</p> <p>Bimbingan adaptasi masyarakat</p> <p>Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial</p> <p>Pelayanan pos di daerah transmigrasi</p> <p>Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan</p> <p>Penilaian transmigran teladan</p> <p>Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Kabupaten Rembang pada SETDA
97	470	<p>KELUARGA BERENCANA</p> <p>Alat Kontrasepsi</p> <p>Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri</p> <p>Penyuluh Lapangan KB (PLKB)</p> <p>Pos KB Desa, Akseptor KB</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sub Koordinator Keluarga

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Berencana pada DINSOS PPKB
98	480	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada DISKOMINFO
99	480	MEDIA MASSA Surat Kabar, majalah, Buletin, Jurnal Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok Perekonomian dan perbankan Bidang lainnya Layanan Informasi/Leaflet Masukan Analisis Bupati Televisi Film Dokumenter Kewartawanan/Jurnalistik Pembentukan Organisasi Profesi Kasus-kasus kewartawanan Penyalahgunaan Profesi Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada DISKOMINFO; 2. Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan Temu Pers/Konferensi Pers. Pers tour Kunjungan Wartawan Asing Penyuluhan Masyarakat, Publikasi Lembaga Komunikasi masyarakat, lembaga Pemerintah Pertemuan bakohumas dan Kehumasan Training Fotografi, training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Rakorda Infokom</p>				
100	480	<p>Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Radio Pengawasan Lembaga penyiaran kelompok Pemantau Isi Siaran Pengkajian Isi Siaran SDM Penyiaran Periklanan Ketentuan Pemasangan Reklame</p>	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Kewenangan Komisi penyiaran Indonesia Daerah Kabupaten Rembang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pameran				
101	480	Pendirian Informasi Center Pebinaan Bidang Infokom Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah Wahana Komunikasi Masyarakat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Promosi Luar negeri Kunjungan Wartawan Asing Fasilitasi Peningkatan pelayanan Informasi Sistem Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif Dialog Interaktif, Rubrik Materi/Pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif Pembuatan Kolom Khusus Hasil Pembangunan Bantuan kepada/dari organisasi profesi Wartawan Musyawarah Wartawan Indonesia Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika, pada DISKOMINFO

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Temu Pers/Konferensi pers Penyuluhan Masyarakat Publikasi Training Fotografi Training Berita Jurnalistik Bintek Infokom Lembaga Komunikasi masyarakat Pertemuan bakohumas dan Kehumasan				
102	480	Rakor Pengendalian Kegiatan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada DISKOMINFO
103	480	Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Rembang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika, pada DISKOMINFO
104	500	PEREKONOMIAN Dewan stabilisasi Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, bidang perdagangan Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						pada DINDAGKOP
105	500	Perizinan pada umumnya untuk perizinan sesuai bidang, klasifikasi pada masalahnya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub Koordinator Pemrosesan dan Penetapan Perizinan DPMPTSP
106	510	PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
107	510	Promosi perdagangan Pekan raya Pameran Pelelangan, distribusi Pemasaran Sembako Penentuan harga pokok Bina usaha dan sarana perdagangan Rencana dan program kerja	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Beras, Garam Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dll Pemasaran Pertokoan, Kaki Lima, Kios, Pusat Perbelanjaan				Kecil dan Menengah
108	510	Pasar Ekspor Ijin ekspor Perdagangan luar negeri Manajemen perdagangan internasional Pemberitahuan ekspor barang	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perdagangan Sub Koordinator Promosi dan Pengembangan Ekspor, Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
109	510	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll) Penerbitan SIUP Perpanjangan Ijin prinsip Rekomendasi Perdagangan antar Pulau Kerjasama bahan baku	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perdagangan, Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan pada Dinas

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Industri pemasaran Kontrak Tera dan Tera Ulang, Biaya tera, Cap tanda tera Takaran, timbangan dan anak timbangan				Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
110	510	Kalibrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, bida ng perdagangan, Su b Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
111	510	Perdagangan antar pulau Aneka Usaha Perdagangan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perdagangan, Sub Koordinator Promosi dan Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dan Koperasi,

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Usaha Kecil dan Menengah
112	510	Impor Ijin Impor Pemberian ijin Pengendalian ijin	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasanserta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perdagangan, Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
113	510	Standar Mata Dagang Impor Management Perdagangan internasional Kegiatan Impor Pembinaan Impor Pengendalian Impor Pemantauan Impor Faktor-faktor Pendukung Pengawasan Mutu Barang Impor Penyaluran Kegiatan Impor Bahan Konsumsi Bahan Baku Bahan Penolong	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perdagangan, Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor Usaha Negara (Perjan, Perum, Persero Perusahaan Daerah				
114	510	Kerjasama Bahan Baku Industri Pemasaran Kontrak Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri Promosi dan Informasi Kerjasama Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan Peti Kemas Tangki Penyimpanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perdagangan, Sub Koordinator Kepatuhan Perizinan Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
115	510	KOPERASI Bina Usaha Koperasi Koperasi Pertanian	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
116	510	Koperasi Non Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi,

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Usaha Kecil dan Menengah
117	510	Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Permodalan Koperasi Pemupukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa Koperasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Sub Koordinator Perekonomian pada Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah.
118	510	Distribusi Bahan Pokok Distribusi Aneka Bhana Distribusi Kerjasama Niaga Jasa Angkutan Jasa Perumahan Aneka Jasa	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidangpada dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Koperasi Kelistrikan, Industri dan telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi				2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Sub Koordinator Perekonomian pada Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah.
119	510	Organisasi koperasi Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi Pemberian Badan Hukum Koperasi Penyelesaian Pembubaran koperasi Keragaman Koperasi Pengakuan Koperasi Sekolah Amalhamasi Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Koperasi, Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
120	510	Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Koperasi, Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Unit Desa (BPP KUD)			Perangkat Daerah	Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
121	510	Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan/Manager Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD Akuntansi Akuntansi Koperasi Pedesaan/Perktaan Akuntansi Koperasi Sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
122	510	Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi primer Pengawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Koperasi, Sub Koordinator Pengawasan dan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawasan usaha Pengawasan Usaha Mikro Pengawasan Usaha Kecil Pengawasan Usaha Menengah		serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Pengendalian Koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
123	510	Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan kader Koperasi Masyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengha	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Koperasi, Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sub

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Koordinator Perekonomian pada Sekretariat Daerah
124	520	PERTANIAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/Inmas termasuk kredit Pelaporan dan Evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Panen Gagal (Puso)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	SekretariatBidan g Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura,pad a Dinas Pertanian dan Pangan
125	520	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada Dinas

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Pertanian dan Pangan
126	520	Sarana Usaha pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Sub Koordinator Sarana Pertanian pada
127	520	Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, Petani Lahan kritis	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Sub Koordinator Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan pangan
128	520	Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada Sub Koordinator Produksi Tanaman

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Agensia Pengendalian Hayati				Pangan dan Hortikultura, pada Dinas Pertanian dan pangan
129	520	Pengembangan Sumber Daya Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan pangan
130	520	Pemasaran dan Promosi Pertanian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penyuluhan Sub Koordinator Pengembangan Kelembagaan Petani pada Dinas Pertanian dan pangan
131	520	KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Bidang penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan hidup
132	520	Tata ruang Kawasan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perijinan pada DPMPTSP
133	520	PERIKANAN DAN KELAUTAN Perumusan Kebijakan, Rencana, Program, Statistik, Prospek, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
134	520	Penyuluhan Pengembangan dan Pemberdayaan Penyuluh Pengembangan SDM Penyuluh Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayanan Usaha Perikanan Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sertifikasi hasil tangkapan ikan dan cara penangkapan ikan				
135	520	Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ijin usaha perikanan tangkap Penerbitan buku kapal perikanan, Pendaftaran kapal Teknologi Produksi Perikanan Standarisasi Mutu hasil Perikanan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
136	520	Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon dengan Profesi lain Pengendalian Sumber Daya Ikan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas, Mediasi, Penyelesaian Konflik antar nelayan Penanganan Tindak Pidana Sumber Daya Kelautan Perikanan Koperasi Kapal Pengawas Perikanan Penetapan Rencana zonasi, pengelolaan dan aksi pengelolaan pesisir	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kenelayanan, Sub Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
137	520	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pembinaan wanita nelayan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya Sub Koordinator

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Produksi Budidaya pada Dinas Pertanian dan Pangan
138	520	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Ekspor Hasil Perikanan Impor Hasil Perikanan Pemasaran Dalam Negeri Pengusaha perikanan Sarana Perikanan Rekomendasi ijin Usaha Perikanan (Pembenihan/Pembesaran) Fasilitas perijinan :SIUP, SIPI, SKP Pembenihan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Permodalan dan Investasi Kelompok Pembudidaya Ikan Pengendalian hama dan penyakit Penyakit ikan Hama ikan Laboratorium Kesehatan Ikan Obat-obatan termasuk sertifikasinya	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing, Sub Koordinator Kemitraan dan Pemasaran Produk Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan
139	520	Kepelabuhanan Perikanan Pantai Pengembangan Pelabuhan Perikanan Bimbingan Teknis Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaraan TPI/PPI Kesyahbandaraan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Kenelayanan, Sub Koordinator Produksi dan Sarana

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb				Prasarana Kenelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
140	520	Konservasi dan Suaka Laut Transplantasi bibit karang Garam Terumbu karang Mangrove Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Harta karun di dalam laut Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan Dan Perikanan
141	520	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan Budidaya Usaha Peternakan Pelayanan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
142	520	Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Obat-obatan Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	SekretariatBidan g Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan
143	520	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Soonosis dan kesejahteraan Hewan Hygieni dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan Hewan Pengujian Mutu Asal Hewan Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan Inseminasi Buatan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Pangan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
144	520	Produksi Distribusi dan Pemasaran Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ternak Non Ruminansia Ternak Ruminansia	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pernakan dan Kesehatan HewanSub Koordinator Pembibitan dan Produksi Pernakanpada Dinas Pertanian dan Pangan
145	520	Perkebunan Kemitraan Kelompok Tani Usaha Perkebunan Program dan Pelaporan Monitoring Statistik Perkebunan Pembibitan/Benih Produksi Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan Pemasaran Hasil Perkebunan Perlindungan Tanaman H a m a Pestisida Agensia Pengendalian Hayati	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian
146	520	Alat dan Mesin Perkebunan Power Sprayer Hand Sprayer	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan,	Memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Perkebunan Sub Koordinator

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Polibag Alat Laboratorium Perkebunan Reagen Sarana/Alat Produksi Perkebunan Pengolahan lahan Perasering Pemasyarakatan Penyuluhan; Sosialisasi; Informasi		pengawasan serta penegak hukum	kinerja Perangkat Daerah	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan
147	520	KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Kerawanan Pangan Sumberdaya Pangan Analisis dan Kajian Ketersediaan Pangan Neraca bahan makanan Infrastruktur pangan sumber pangan Program Bimbingan Massal Pengembangan Sarana Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Pemodalan Kelembagaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan
148	520	Agribisnis Mutu Hasil Pengelola Hasil Pangan Pemasaran Hasil Kementerian	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan pada

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Dinas Pertanian dan Pangan
149	520	Distribusi Pangan & Cadangan Pangan Harga Pangan Neraca Pangan Teknisi Harga Pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan Keamanan dan Mutu Pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Sistem Informasi Pangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan
150	520	Kelembagaan Keamanan Pangan Bimtek & Supervisi Kelembagaan Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Serifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar Bimtek & Supervisi Pengawasan Keamanan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Sub Koordinator Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan
151	520	Promosi Penganekaragaman Pangan B2SA	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang	Sekretariat, Bidang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Pangan Lokal Inovasi Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Bimtek & Supervisi Pangan Lokal Analisis & Kajian Potensi Pangan Lokal		kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Ketahanan Pangan, Sub Koordinator Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan
152	520	PENYULUHAN Sumber Daya Manusia Kelembagaan Penyelenggaraan Penyuluhan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penyuluhan, Sub Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan
153	530	PERINDUSTRIAN Undang-undang Gangguan Industri Logam Industri Mesin/Elektronik Industri Kimia/Farmasi Industri Tekstil Industri Maknan/Minuman	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
154	530	Aneka Industri/Perusahaan Home Industri Aneka Kerajinan Pemasaran hasil industri Ekspor hasil industri	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sub Koordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; 2. Bidang Perdagangan, Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
155	540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Perijinan Rekomendasi Kontrak Karya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
156	540	Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker Energi Energi alternatif Gas Rawa Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biogas Energi baru terbarukan Perijinan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
157	540	Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air tanah Cekungan Air Tanah (CAT): Pemetaan, Imbuhan, Lepasan Konservasi Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis, Sumur Bor, Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Sumur Pantau Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air Hidrologi Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi, Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (longsor, amblesan) Pengawasan, pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi				pada Bagian Peekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
158	540	Pertambangan, mineral dan batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Batuan WIUP Bukan Logam WIUP Logam WIUP Batubara Rekomendasi Teknis Perijinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus Ijin Usaha Jasa Pertambangan Pencabutan Ijin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Dinas Lingkungan Hidup; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3. Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bagian Peekonomian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penerbitan Kegiatan Pertambangan				dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
159	550	PERHUBUNGAN Perhubungan Darat Angkutan Jalan Raya Perizinan Trayek Terminal Alat Angkutan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan pada Dinas Perhubungan
160	550	Trayek Angkutan Dalam Tryaek Angkutan Tidak Dalam Trayek Angkutan Penumpang Angkutan Barang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
161	550	Keamanan Lalu Lintas, Rambu- rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Uji Mutu Keselamatan, Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan Raya	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Lalu Lintas, Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan pada Dinas Perhubungan
162	550	Lalu Lintas Sungai dan Danau Perizinan Laut Perkapanan Alat Angkutan Angkutan sungai Keselamatan, Rambu-rambu	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Alur dan Kolam Pelabuhan Tryaek Sarana/Kapal Kecelakaan Perhubungan Laut Pelabuhan Laut Lalu Lintas Angkutan Laut Keamanan Lalu Lintas, Rambu- rambu Pelayaran Dalam Negeri Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Haji Pelayaran Charter/Wisata Turis Pelayaran Khusus Pelabuhan Alur Layar Terminal Penumpang/kontainer Terminal Keberangkatan Penumpang Terminal kepulangan Penumpang Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus Pergerakan/Perawatan Alur Pelayaran Kolam Pelabuhan Reklamasi Pantai Dumping Area Pekerjaan Bawah Air (Salvage) Penjagaan Pantai Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)		serta penegak hukum	Perangkat Daerah	

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Patroli Bandar Patroli Perairan Sertifikat Awak Kapal Kecelakaan, Gangguan Kecelakaan Penumpang/Kapal Kecelakaan Barang Gangguan Sarana/Prasarana Pembijakan/Penyelundupan Pencemaran Perijinan Berlayar/Ijin Pembangunan/Ijin Usaha				
163	550	Teknologi Informasi Kebijakan Peralatan Telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada DISKOMINFO
164	550	Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, Stasiun Bumi Radio komunikasi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada DISKOMINFO
165	550	Sistem Pembinaan/penertiban Perijinan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Publik pada DISKOMINFO
166	550	Pariwisata dan Rekreasi Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Bagian Perjalanan Wisata Restoran dan Rumah Makan Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata Ijin Pariwisata Ijin Usaha Pariwisata Ijin Usaha jasa Pariwisata Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Ijin Usaha Sarana	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sub Koordinator Perekonomian Sekretariat Daerah
167	550	Wisatawan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Promosi dan Informasi Pariwisata Dalam Negeri Luar Negeri Perhotelan Status Hotel Perhotelan Status Hotel Kelas Hotel	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Destinasi Pariwisata Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		T a r i f Travel Service Pramu Wisata Bagian Perjalanan/Angkatan Wisata Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina) Tempat Rekreasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karya Manusia Rehabilitasi/Perawatan Pengembangan Fasilitas Tanah/Bangunan				2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sub Koordinator Perekonomian Sekretariat Daerah
168	550	Bina Usaha Institusi Aosiasi Lembaga Kepariwisataaan	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sub Koordinator Perekonomian Sekretariat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
169	560	TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI Rekrutmen Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Persyaratan Naker TKI/TKW Permohonan Rekomendasi Passport Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ; 2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
170	550	Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW KE Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW	Biasa/Terbuka	Pengguna dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Sub Koordinator

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Informasi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial.
171	560	Pemulangan Naker Kepulangan TKI/TKW Karena Kotraknya Habis Pemulangan TKI/TKW Ilegal TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP) Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja Kesempatan Kerja Bersama (KKB)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Sub Koordinator Informasi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Lembaga Penyalur Naker Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK) Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial.
172	560	Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) Rencana Penggunaan tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data Tenaga Kerja Asing Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulangan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Sub Koordinator Informasi, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Kesejahteraan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Rakyat, Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
173	570	PENANAMAN MODAL Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal) Pasar Uang dan Modal Saham	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat, Bidang pada di DPMPTSP Kabupaten Rembang
174	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Perumusan Kebijakan Bidang KePUan, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Evaluasi Laporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Sekretariat, Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
175	600	Arsitektur Bahan bangunan Tanah dan batu Aspal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Besi dan logam lainnya Besi beton Besi Profil (konstruksi) Paku		serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
176	600	Alumunium profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu) S e m e n Terhadap serangga Terhadap radiasi atom	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
177	600	Kayu Bahan penutup Atap Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya I n s t a l a n s i Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air/sanitasi Instalansi pengatur udara Instalansi akustik Instalansi cahay/penerangan Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa Terhadap angin/udara/panas Terhadap kegaduhan, Terhadap gas/esplosive	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
178	610	P E N G A I R A N Irigasi Bendungan Waduk Bendungan Tanggul Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan pengambilan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
179	610	Bendungan Bendungan dengan pintu bilas Bendungan dengan pompa Pelimpahan banjir Inventarisasi data pantai Laporan Kejadian Banjir Pengambilan bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan pompa	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
180	610	Kantung lumpur Silf ekstretor Escape chenel Bangunan pembawa Saluran Saluran induk Saluran sekunder	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
181	610	Suplesi Tersier Saluran kwarter Saluran pasangan Saluran tertutup/terowongan Bangunan Bangunan bagi	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
182	610	Bangunan dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan terjun Bax Tersier Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpahan Pembuangan Saluran Saluran Pembuangan induk Saluran Pembuangan sekunder Saluran Pembuangan tersier Bangunan Bangunan out let Bangunan terjun Bangunan penahan banjir Gorong-gorong pembuangan Talang pembuang	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Syphon pembuangan Bangunan lainnya Jalan Jalan Inspeksi				
183	610	Jalan Logistik Jembatan Jembatan inspeksi Jembatan Hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan penunjang Jaringan telepon	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
184	610	Stasiun Argo Bangunan TPI dan pasar ikan P o l d e r Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Saluran stasiun pompa pemasukan Bangunan bagi : Gorong-gorong Syphon Bangunan pembuangan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Kelautan dan Perikanan K;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Stasiun pompa pembuangan Pintu Air Pembuangan Gorong-gorong pembuangan Syphon pembuangan Bangunan Pengukur Air Bangunan Pengukur Curah Hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang surut Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Saluran Pintu Pembuangan Bangunan pembuangan Saluran Pintu Pembuangan Bangunan lainnya				3. Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
185	610	Kolom pasang Saluran Saluran Lalu Lintas Saluran Muka Bangunan Bangunan Penangkis Kotoran Bangunan Pengukur Muka Air Pengendalian sungai Bangunan pengaman Tanggul banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur Banjir Tembok pengaman Talut	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		K r i b Kantung Lumpur Check Dam Syphon Saluran pengaman Saluran banjir Saluran Drainage Corepure Bangunan lainnya Warning System Stasiun, Stasiun Pompa Stasiun pengukur Curah Hujan Stasiun Pengukur Air Stasiun Pengukur Cuaca Stasiun Pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul K r i b Bangunan lainnya Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)				
186	620	J A L A N Jalan Kabupaten Daerah Penguasaan T a n a h	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
187	620	Bangunan Bangunan sementara Jalan Sementara Kantor proyek Gedung proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan R u m a h	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
188	620	Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasa Lapisan Pondasi bawah Lapisan Pondasi Lapisan Permukaan Drainage Parit Tanah Gorong-gorong (culvert) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Pasangan M e d i a n T a n a h Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah sampingan Tanaman	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pagar Bangunan Pelengkap dan Pengaman Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu Pengaturan lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W (Sempadan) Rel Pengamanan P a g a r Turap Penahan Bronjong				
189	620	Jalan Kabupaten Daerah penguasaan Tanah Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung Proyek	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190	620	Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan jalan Pekerjaan tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan (pavement) Lapis pondasi bawah Lapis pondasi Lapis permukaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Drainage Parit Gorong-gorong (culvert) Buku trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Median Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan Rambu-rambu Lampu penerangan Lampu Pengatur lalu lintas Patok-patok KM				2. Bidang Prasaana pada Dinas Perhubungan.
191	620	Patok-patok R, O, W (sempadan) Rel pengamanan Pagar Turap penahan Bronjong Daerah penguasaan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Badan jalan				Umum dan Penataan Ruang
192	620	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
193	630	JEMBATAN Jembatan pada jalan Kabupaten Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi, Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pondasi angker Bangunan bawah Kepala jembatan Pilar Piloon				
194	630	Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoar Sandaran Talang air	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
195	630	Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Streak Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksipada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Baku Median Jembatan pada jalan Kabupaten Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah (earth work) Galian tanah				
196	630	Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepala jembatan Pondasi pilar Pondasi angker Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Streak Dam Kist Dam Coupute Krip Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok pengamanan Patok R.O.W. (sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median Jembatan pada jalan Nasional Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan) Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)				

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bangunan pengamanan (bronjong strek dam, krib) Bangunan pelengkap dan pengaman				
197	640	BANGUNAN Bangunan Pemerintah: Gedung Pengadilan, Rumah Pejabat Negara, Gedung DPR, Gedung Balai Kota, Penjara, Perkantoran Bangunan Pendidikan: Taman Kanak-kanak, SD & Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi Bangunan Rekreasi Bangunan Olah Raga Gedung Kesenian, Gedung Pemancar Bangunan Perdagangan: Pusat Perbelanjaan, Gedung Perdagangan Perkantoran Bangunan Pelayanan Umum: Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum Gedung parkir Rumah sakit Gedung telkom Terminal Angkutan Umum/Angkutan Air/Angkutan Darat Bangunan Keagamaan, Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan Tempat Tinggal Rumah Perkantoran				
198	460	Rumah Pedesaan Rumah contoh Real estate Elemen Bangunan Pondasi Diatas tiang Dinding Penahan beban Tidak menahan beban Atap Lantai/langit-langit Suspended Solit Pintu/jendela, Pintu hermonik, Pintu biasa, Pintu sorong Jendela kayu, Jendela sorong, Jendela vertikal	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
199	640	FASILITAS PENGADAAN TANAH Perumahan Perencanaan Teknis Pengoordinasian Fasilitas Pengadaan tanah Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah, Penetapan Lokasi, Ganti Rugi dan Santunan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Aset Daerah sampai dengan sertifikatnya Penetapan Obyek/Subyek Redistribusi Tanah, serta ganti kerugian Tanah dan Absente lintas Daerah Kab/Kota Fasilitas administrasi Pertanahan Penetapan tanah wilayah lokasinya lintas daerah Evaluasi dan Pelaporan				
200	640	FASILITAS PERMASALAHAN PERTANAHAN Perumahan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Pengoordinasian Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi Penyediaan Rumah Inventarisasi Permasalahan Pertanahan Kab/Kota Fasilitasi Penyelesaian Sengketa tanah grapan lintas daerah Kab/Kota Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Inventarisasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kab/Kota Penyelesaian masalah tanah lintas daerah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi dan Pelaporan				
201	640	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN Perumusan Kebijakan Teknis Menyiapkan bahan pengoordinasian Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota Pemberian ijin lokasi Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
202	640	PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN Perencanaan Teknis Pembiayaan Perumahan Perencanaan Perumahan Pembangunan Perumahan Pelayanan data Teknis/Konstruksi Perumahan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
203	640	PERUMAHAN UMUM Perumusan Kebijakan Teknis Penyediaan Prasarana sarana Utylitas Umum Rumah Korban Bencana Daerah Fasilitas Penyediaan Rumah Penyediaan Rumah Susun Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perumahan dan Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Rumah Tapak Sederhana sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pelaporan di bidang Perumahan Umum				
204	640	PERUMAHAN SWADAYA Kebijakan Teknis di Bidang Perumahan Swadaya Pengoordinasian di Bidang Perumahan Swadaya Pengembangan Perumahan Swadaya Fasilitas dan Stimulan Pembangunan, Pemanfaatan Rumah bagi Rumah Tangga Miskin	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kawasan Permukiman
205	640	PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PEMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis Penyiapan Bahan Pengoordinasian Perencanaan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Prasarana dan Sarana Utylitas Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
206	640	PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTILITYAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis Menyiapkan Bahan Pengoordinasian. Pengkajian Prasarana Sarana Utylitas.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Penyusunan dan Pengembangan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.				
207	640	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN Perumusan Kebijakan Teknis. Pengoordinasian. Bimbingan Teknis dan Supervisi. Pengkajian dan Penyusunan Inovasi. Fasilitasi Peningkatan. Pengembangan Jejaring Kemitraan. Evaluasi dan Pelaporan.	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
208	640	PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN. Perumusan Kebijakan Teknis. Penyiapkan Bahan Pengoordinasian. Penyusunan Data Base. Pengelolaan Data. Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Pemanfaatan Rumah bagi Korban Bencana Alam. Pemeliharaan Prasarana Sarana Uilitytas Perumahan Swadaya Pemberdayaan dan Kemitraan Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
209	650	TATA RUANG KOTA Daerah perdagangan/pelabuhan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan (site & servei) Kepadatan Rendah (low density) Kepadatan Tinggi (high density) Daerah Industri Industri Berat Industri Ringan Industri Rumah (home industri) Daerah Rekreasi (open spece) Publik Garden Sport & playing fields Open space Transportasi (tata letak) Jaringan jalan Penerangan jalan Jaringan kereta api	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Kontruksi, Bida ng Tata Ruang, Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Bidang Perdagangan, Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 3. Bidang Sarana pada Dinas Perbuhungan Kabupaten

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Rembang.
210	650	Jaringan sungai Assineering Saluran Pengumpulan Instansi Pengolaha Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Penghancur Kotoran Bangunan Pengendapan Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaaan Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpulan Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan Kota	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Penataan Bangunan dan Bina Jasa Kontruksi, Bidang Sanitasi dan Air Minum, Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						Lingkungan Hidup
211	660	TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Udara Pencemaran Tanah Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan Lingkungan Konservasi Pesisir Dan Laut Konservasi Sumber daya Alam	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; 2. Bidang Sanitasi dan Ais Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
212		Penataan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air, Udara, Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup.
213	680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM	Terbatas	Dibatasi hanya untuk penentu	Memiliki dampak yang	Sekretariat/Bagi an

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	menggangu kinerja Perangkat Daerah	Umum/Bagian TU pada: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
214	700	PENGAWASAN Kebijakan dan program pengawasan Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek Pengawasan Inventarisasi Asset Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan Penelitian/Riset Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi Pengawasan Pertanahan/BPN	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah.
215	710	BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintahan Provinsi Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Pemerintahan Desa	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan	Memiliki dampak yang menggangu kinerja	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Ba gian

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
				serta penegak hukum	Perangkat Daerah	Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
216	720	BIDANG POLITIK Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
217	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
218	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Kebudayaan Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah.
219	750	BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Pengawasan Pertanian dan Perkebunan Pengawasan Kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/Moneter Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah.

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
220	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan Pengawasan Ketenagaan Pengawasan Air Minum	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah.
221	770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada masing-masing Perangkat Daerah
222	780	BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan PNS Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyimpangan pejabat/PNS Persengketaan PNS	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Bagian Umum/Bagian TU pada

NO	KODE KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
						masing- masing Perangkat Daerah.
223	790	BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan	Rahasia	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan serta penegak hukum	Memiliki dampak yang menggangu kinerja Perangkat Daerah	1. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV; 2. Sekretariat/Ba gian Umum/Bagian TU pada masing- masing Perangkat Daerah.

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	